**PEMETAAN POTENSI DESA-
PRUKADES DAN PENDAMPINGAN
PENINGKATAN KAPASITAS
BUMDES DI PEKON SUKABANJAR,
LUMBOK SEMINUNG, LAMPUNG
BARAT**

**Yulianto^{1*}, Selvi Diana Meilinda¹,
Teuku Fahmi², Dewi Ayu
Hidayati², Astiwi Inayah³**

¹ Jurusan Ilmu Administrasi
Negara FISIP Universitas
Lampung

² Jurusan Sosiologi FISIP
Universitas Lampung

³ Jurusan Hubungan
Internasional FISIP Universitas
Lampung

Article history

Received : 06 Juli 2020

Revised : 10 November 2020

Accepted : 14 November 2020

*Corresponding author

Email : yulianto@fisip.unila.ac.id

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v2i1.28476>

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal dalam memetakan potensi desa, khususnya produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades). Untuk berikutnya, hasil pemetaan Prukades tersebut dapat dijadikan pengembangan usaha BUMDes di Pekon Sukabanjar. Metode PkM mencakup tiga tahapan, yakni (1) tahapan pendekatan, mulai dari upaya peningkatan aspek kognitif terhadap peserta PkM hingga tahap pendampingan dan pemberdayaan; (2) tahapan pekerjaan, yakni identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan dalam upaya menemukan potensi desa-Prukades; dan (3) tahapan tindak lanjut program. Mengacu dari hasil pelaksanaan PkM terungkap bahwa keberadaan BUMDes di Pekon Sukabanjar belum berdampak secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Setidaknya kendala terbesar terletak pada masih lemahnya aspek tata kelola pengelolaan BUMDes di pekan tersebut. Adapun hasil pemetaan prukades di Pekon Sukabanjar mencakup: (1) keunggulan hasil pertanian yakni alpukat, kopi, singkong, sayur mayur, dan peyediaan bibit tanaman, dan (2) keunggulan potensi wisata mencakup jasa angkutan wisata air Danau Ranau, pemandian air panas di kaki Gunung Seminung, hingga ziarah tempat keramat/suci. Rekomendasi hasil PkM ini menekankan pada prukades yang dimiliki oleh pekan dapat dijadikan pengembangan jenis usaha pada BUMDes di Pekon Sukabanjar.

Kata kunci: BUMDes, Pemetaan, Prukades.

ABSTRACT

The purpose of this community service activity was to increase the knowledge and experience of local communities in mapping the village potential, especially the superior products in rural areas (Prukades). In the future, the results of Prukades mapping could be used as BUMDes business development in Sukabanjar village. The community service method included three stages, namely (1) the approach stage, starting from efforts to improve cognitive aspects of community service participants to the assistance and empowerment stages; (2) stage of work, i.e. identification of strengths and weaknesses to identify the village potential-Prukades; and (3) stage of follow-up program. Referring to the results of the community service implementation, it was revealed that the presence of BUMDes in Sukabanjar had not had an optimal impact on improving the welfare of the surrounding community. At least, the biggest obstacle lied in the weakness of governance to manage the BUMDes. The results of the mapping of Prukades in Sukabanjar included: (1) superior agricultural products, namely avocado, coffee, cassava, vegetables, and the provision of plant seeds, and (2) excellent tourism potential, including Lake Ranau water tourism

transportation services and hot baths at the foot of Mount Seminung. The recommendations from the community service results emphasized that the Prukades owned by village could be used as a development in business types for BUMDes in Sukabandar.

Key word: BUMDes, Mapping, Prukades.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (yang selanjutnya disebut UU Desa) telah menjadi "arus utama" pembangunan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Kehadiran UU Desa menjadi prioritas penting yang saling melengkapi proses pembangunan di Indonesia. Untuk konteks ini, desa kembali ditempatkan sebagai posisi yang sentral dalam pembangunan sebagai langkah pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Dana Desa (DD), sebagai salah satu turunan dari UU Desa, telah dijalankan selama empat tahun terakhir. Dalam hal ini, pemerintah pusat selalu menambah alokasi program dana desa di tiap tahunnya. Pada Gambar 1 terlihat peningkatan alokasi DD dan rata-rata alokasi DD tiap desa sebagaimana yang dirilis oleh Kemenkeu pada 2018 dan 2019. Beragam sarana dan prasarana yang diperoleh dari program DD diantaranya infrastruktur jalan desa, jembatan, sambungan air bersih, tambatan perahu, PAUD, Polindes, pengadaan sumur, pasar desa, drainase dan irigasi, hingga embung (Gambar 2).

Sejalan dengan pelaksanaan DD, Kemendesa PDTT juga telah menetapkan empat program prioritas diantaranya yakni (1) pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), (2) badan usaha milik desa (BUMDes), (3) embung desa, dan (4) sarana olah raga desa.

Secara ringkas, adapun rincian empat program prioritas yakni Prukades, BUMDes, Embung Desa, dan Sarana olah raga desa dijabarkan pada item berikut ini:

Gambar 1. Alokasi DD dan Rata-rata Alokasi DD tiap Desa Kurun Waktu 2015-2018. Sumber dari sipede.ppmd.kemendesa.go.id/ (2020).

(1) Prukades, produk unggulan kawasan perdesaan dimana beberapa desa membentuk klaster ekonomi yang fokus pada produk tertentu; (2) BUMDes, untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD); (3) Embung, penyediaan ketersediaan air untuk meningkatkan dan menjaga kontinuitas produksi pertanian tanaman pangan, palawija, dan hortikultura; dan (4) Sarana olah raga desa, pembangunan sarana prasarana olah raga pemuda desa.

Gambar 2. Info Grafik tentang Capaian DD Tahun 2015-2019. Sumber dari: sipede.ppmd.kemendesa.go.id/ (2020).

Runtutan empat program prioritas Kemendesa PDTT sudah didesain sebagai satu kesatuan yang saling menunjang guna terciptanya kemandirian desa. Pada tataran awal, tiap desa diharapkan mampu menemukan keunggulan lokal yang ada di desa lalu dijadikan Prukades. Prukades tersebut dapat dijadikan salah satu jenis usaha pada pengembangan BUMDes di desa tersebut. Pada tahapan berikutnya, Prukades yang ada tiap desa juga dapat melakukan kolaborasi guna memperkuat jaringan kerja sama yang diharapkan mampu menjalin BUMDes Bersama.

Untuk konteks Provinsi Lampung, jumlah BUMDes yang tercatat pada pangkalan data Kemendesa sebanyak 482 (Datin Kemendesa, 2019). Adapun untuk Prukades sendiri hanya tercatat 23 komoditas saja (lihat Tabel 1). Rasio yang timpang ini menunjukkan jika desa perlu

difasilitasi untuk dapat menemukan produk unggulan lokal tersebut.

Tabel 1.

Sebaran Jumlah BUMDes dan Prukades di Provinsi Lampung

Kabupaten	Jumlah BUMDes	Jumlah Prukades
Lampung Barat	7	-
Lampung Selatan	36	-
Lampung Tengah	2	1
Lampung Timur	242	3
Lampung Utara	117	-
Mesuji	54	5
Pesawaran	2	-
Pesisir Barat	3	4
Tanggamus	3	-
Tulang Bawang	5	6
Tulang Bawang Barat	4	4
Total	482	23

Sumber: Kompilasi data datin.kemendesa.go.id dan prukades.kemendesa.go.id (2019).

Mengacu pada klasifikasi Daerah Tertinggal yang dirilis oleh Kemendesa, maka terdapat dua kabupaten di Provinsi Lampung yang masuk ke dalam kategori tersebut yakni Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Jika mengacu pada Tabel 1 sebelumnya, maka pada wilayah ini belum memiliki Prukades. Hal ini terlihat kontras bila dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) pecahan dari Kabupaten Lampung Barat. Mengacu data Kemendesa PDTT (2016) setidaknya terdapat 30 desa yang termasuk ke dalam klasifikasi tertinggal di kabupaten dengan semboyan "Beguai Jejama" ini.

Mengingat potensi alam melimpah yang dimiliki pada tiap desa (sebagai ex Kerajaan Sekala Brak), maka menarik untuk dilakukan kajian dan pendampingan desa-desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat, khususnya tentang Prukades. Terlebih untuk di wilayah sekitaran Danau Ranau yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Lumbok Seminung terdapat potensi wisata dan budi daya ikan keramba pada danau tersebut (Gambar 3). Menarik untuk dicermati konteks sosio-ekonomi masyarakat di pekon Sukabanjar. Variasi mata pencaharian masyarakat Pekon Sukabanjar lebih heterogen dibandingkan masyarakat di beberapa pekon lain yang berada di sekitar Danau Ranau. Dalam hal ini, masyarakat di Pekon

Sukabanjar tidak hanya terpaku pada budi daya ikan keramba, namun umumnya mereka juga memanfaatkan lahan perkebunan yang merupakan bagian dari Bukit Barisan Selatan.

Gambar 3. Kecamatan Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat. Sumber dari <https://maps.google.com> (2019).

Mengacu pada hasil penelitian terdahulu, untuk di kawasan sekitaran Danau Ranau terdapat dua potensi yang dapat dijadikan Prukades pada lokasi ini yakni pengembangan wisata Danau Ranau (Prasetya dan Ansar, 2017) dan budi daya ikan keramba (Sumino, Muda, Alam, dan Oktaviani, 2017). Untuk pengembangan wisata Danau Ranau, Prasetya dan Ansar (2017) telah mengidentifikasi empat ikon tempat wisata di Lumbok Seminung yakni: Kolam air panas, Pulau Marisa, Air Terjun Subik Tuha, dan Seminung Lumbok Resort. Sementara itu, terkait dengan budi daya ikan keramba, Sumino, Muda, Alam, dan Oktaviani (2017) mengungkapkan bahwa keanekaragaman ikan yang didapatkan di Danau Ranau sebanyak 26 jenis. Penelitian mereka juga mengidentifikasi perihal struktur komunitas di perairan Danau Ranau yang mempunyai keanekaragaman sedang, penyebaran sedang, kestabilan komunitas sedang, keseragaman sedang, dan komunitas labil serta tidak ada jenis ikan tertentu yang mendominasi. Dengan begitu, Danau Ranau menyimpan potensi yang unggul dalam hal pengembangan budi daya ikan Keramba (Sumino, Muda, Alam, dan Oktaviani, 2017, p. 557).

Keterbatasan dua penelitian sebelumnya yakni hanya memfokuskan pada upaya identifikasi potensi alam yang dimiliki pada desa yang berada di sekitar

Danau Ranau. Sebagaimana kita ketahui, sinergisitas antar komponen sebagai satu kesatuan aset desa juga perlu diperhatikan secara bersamaan, baik mencakup: aspek manusia, alam, sosial, finansial, dan dukungan fisik. Untuk itu kehadiran tim PkM Unila berupaya untuk kembali menemukan potensi desa dengan mengombinasikan konsepsi prukades dan pelibatan keberadaan BUMDes.

Data Kemendesa PDTT (2016) tentang Daftar Daerah Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun menempatkan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung (selain Kab. Pesisir Barat). Untuk tingkat kecamatan, di Kec. Lumbok Seminung sendiri terdapat empat (4) desa dengan klasifikasi Sangat Tertinggal. Fenomena ini menjadi kontras dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki pada wilayah tersebut. Mengingat keberadaan Danau Ranau sejatinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karenanya, Tim Pelaksana Pengabdian Unggulan Unila kali ini mencoba untuk melakukan pemetaan potensi Prukades dan pendampingan peningkatan kapasitas BUMDes yang ada di wilayah Kec. Lumbok Seminung. Secara teknis, ruang lingkup kegiatan pengabdian yang dilakukan nantinya akan mencakup:

1. Apakah di Pekon Sukabanjar, yang merupakan kategori Desa Sangat Tertinggal, di Kec. Lumbok Seminung sudah pernah dilakukan pemetaan Prukades?
2. Jika sudah, apakah hasil pemetaan Prukades tersebut sudah diintegrasikan dengan pengembangan BUMDes yang ada?

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Prukades

Secara konseptual, produk unggulan merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu desa atau daerah. Produk unggulan tersebut sejatinya memiliki nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Alas produksinya tersebut mengacu pada beberapa pertimbangan, semisal (1)

kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), (2) talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, (3) kemampuan sumber daya manusia, (4) dukungan infrastruktur, dan (5) kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu (Novianti dan Hakam, 2014).

Pemaknaan sederhana mengenai prukades dapat digambarkan mengenai produk yang potensial yang dimiliki oleh desa lalu dikembangkan dengan pemanfaatan sumber daya manusia lokal guna mendatangkan pendapatan bagi masyarakat di desa tersebut. Penekanan lainnya yakni produk unggulan tersebut punya daya saing yang memperhitungkan orientasi pada pasar serta ramah lingkungan, sehingganya muncullah keunggulan kompetitif yang siap dalam merespons persaingan global. Adapun upaya dalam menentukan prukades dapat memperhitungkan hal-hal berikut ini:

1. Produk berasal dari potensi sumber daya setempat/lokal, ini bertujuan sebagai langkah pemanfaatan sumber daya yang ada di desa.
2. Memiliki segmentasi pasar yang luas sehingga produk tersebut dapat terjual dan membuahkan keuntungan
3. Produk memiliki efek berganda (*multiplier effect*) dalam mendorong pertumbuhan aspek ekonomi yang lain.
4. Mampu bersinergis dengan usaha lainnya yang telah dijalankan di desa.
5. Produk unggulan dapat memperhitungkan beragam produk yang sedang 'naik daun' dipasaran.

Tinjauan tentang BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang memiliki kekhasan perihal 'desa' dan dibentuk secara kolektif oleh pemerintah dan masyarakat lokal. UU No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM Desa didesain oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan segala lingkup potensi ekonomi, serta mengikutsertakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (vide penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa).

Pada konteks ini, kehadiran BUM Desa sejatinya diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan sosial (*social*

benefit) yang besar bagi kehidupan masyarakat desa. Lebih lanjut, definisi BUM Desa dalam UU No. 6/2014 tidak hanya terletak pada kemampuan/kehebatan BUM Desa untuk menghasilkan keuntungan/laba besar, asset yang bernilai milyaran rupiah, hingga banyaknya kunjungan wisatawan ke desa.

METODE

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian ini dapat diamati pada Gambar 4. Pada alur bagan tersebut digambarkan tiap tahapan yang harus dilalui agar tujuan kegiatan pengabdian ini dapat tercapai secara optimal.

Gambar 4. Alur Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahapan Pendekatan
Pada tahap ini setidaknya terdapat tiga proses turunannya, yakni tahap peningkatan aspek kognitif, tahap pendampingan dan pemberdayaan, serta tahap advokasi dengan jaringan publik lainnya.
2. Tahapan Pekerjaan

Pada tahapan ini, proses awal yang dilakukan ialah identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan dalam upaya menemukan potensi desa-Prukades. Berdasarkan proses identifikasi tersebut, akan diperoleh langkah strategis apa saja yang dapat digunakan dalam upaya pengembangan BUM Desa.

3. Tahapan Tindak Lanjut Program

Tahapan ini dilakukan agar terdapat keberlanjutan program dari pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan. Pada aspek ini, tim PkM akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah/pusat dan jaringan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya pengembangan BUMDes di Pekon Sukabanjar.

HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan ke dalam empat tahapan kegiatan, yakni: persiapan pelaksanaan, pelatihan dan pendampingan, evaluasi, dan pelaporan. Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan selama dua bulan (April-Mei 2019). Adapun beberapa hal yang dipersiapkan diantaranya: koordinasi di antara tim pelaksana PkM dan koordinasi dengan pihak pamong Pekon Sukabanjar.

Mengacu pada kerangka pemecahan masalah, maka materi yang disampaikan dalam pelatihan dan pendampingan mencakup:

1. Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa,
2. Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa,
3. Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes, dan
4. Persiapan dan langkah pemetaan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades).

PEMBAHASAN

Proses pemetaan potensi desa/pekon pada PkM ini menggunakan ide (gagasan) sederhana untuk memanfaatkan potensi dan aset desa melalui langkah "3 D" (Dipetakan, Direncanakan, Dikelola). Dengan begitu, hasil pemetaan prukades tersebut dapat dijadikan salah satu jenis

usaha pada pengembangan BUMDes di desa sasaran.

Penerapan langkah "3 D" dikombinasikan dengan teknik diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) melalui perlibatan kelompok masyarakat baik dari unsur perangkat desa dan masyarakat lokal. Selain itu, guna mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait dengan pengelolaan BUMDes di Pekon Sukabanjar, teknik wawancara mendalam juga dilakukan kepada informan yang menjadi pengelola BUMDes di pekon tersebut.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa kegiatan pemetaan prukades selama ini belum pernah dilakukan di Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung. Hal ini menjadi sesuatu yang kontras mengingat keberadaan BUMDes di Pekon Sukabanjar telah berjalan tiga tahun. Terkait dengan skala jenis usaha yang selama ini dijalankan oleh BUMDes cenderung bergiat dibidang simpan pinjam dan penyediaan pupuk untuk bercocok tanam.

Walaupun Pekon Sukabanjar berada dipinggir Danau Ranau, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, baik petani kebun maupun petani sawah. Hasil pertanian yang dihasilkan diantaranya alpukat, kopi, singkong, sayur mayur, dan peyediaan bibit tanaman. Untuk itulah hasil pertanian menjadi komoditas utama dan unggulan dari Pekon Sukabanjar. Meskipun demikian, ada juga sebagian kecil dari masyarakat Pekon Sukabanjar yang membudidayakan ikan keramba. Hasil tangkapan Ikan Nila dijadikan penganan olahan lainnya oleh masyarakat Pekon Sukabanjar sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.

Keeksotisan Danau Ranau juga menyimpan potensi wisata di Pekon Sukabanjar. Adapun keunggulan potensi wisata di pekon ini mencakup jasa angkutan wisata air Danau Ranau, pemandian air panas di kaki Gunung Seminung, hingga ziarah tempat keramat/suci. Ada dua lokasi tempat keramat yang kerap didatangi oleh peziarah yakni Puyang Seranjangan dan Si Pahit Lidah. Umumnya lokasi suci tersebut ramai dikunjungi saat bulan Muharram.

Temuan lain menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes di Pekon Sukabanjar

belum berdampak secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini terungkap dari hasil FGD yang dilakukan dan dikonfirmasi langsung baik dari masyarakat lokal dan perangkat desa setempat. Setidaknya kendala terbesar terletak pada masih lemahnya aspek tata kelola pengelolaan BUMDes di pekon tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dinyatakan oleh Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna (2016) di mana kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja menjadikan BUMDes tidak optimal berjalan.

Gambar 5. Aktivitas PKM mencakup pelatihan, pendampingan dan pemetaan Prukades (2019).

Meskipun keberadaan BUMDes di Pekon Sukabanjar belum berjalan secara optimal. Namun dengan hasil pemetaan prukades yang telah dihasilkan dari kajian ini dapat menjadi referensi untuk dijadikan bahan alternatif atau diversifikasi jenis usaha BUMDes di Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung.

Pada kegiatan pengabdian ini evaluasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu *pre test* dan *post test*. *Pre test* dilaksanakan sebelum peserta mendapatkan materi pelatihan, sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan para peserta sebelum training. Evaluasi awal dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan singkat sesuai dengan materi yang diberikan.

Adapun *post test* dilaksanakan pada akhir kegiatan, setelah para peserta mengikuti semua materi yang diberikan. *Post test* dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang serupa dengan *pre test*, sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan/peningkatan pengetahuan para peserta tentang materi yang diberikan. Sedangkan evaluasi mengenai keterampilan peserta dilakukan berdasarkan hasil kerja kelompok dan pada saat presentasi.

Setelah dilakukan pelatihan tentang pemetaan potensi Prukades dan pendampingan peningkatan kapasitas BUMDes yang ada di wilayah Pekon Lombok, Kec. Lumbok Seminung. Peserta yang mengikuti evaluasi awal dan akhir berjumlah 20 orang yang berasal dari pekon tersebut. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 16,0%. Pada aspek praktis, munculnya inisiasi pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan dan pengelolaan BUMDes yang lebih profesional.

Mengacu pada hasil evaluasi *pre test* dan *post test*, dapat dinyatakan beberapa hal berikut ini:

1. Terdapat peningkatan rata-rata hitung (*mean*) hasil *pre test* dan *post test*, yakni dari angka 66,0 (nilai *mean pre test*) menjadi 82,0 (nilai *mean post test*). Dari angka statistika tersebut dapat disimpulkan statistik bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan/pemahaman para peserta PkM dengan nilai rata-rata sebesar 16,0 persen.
2. Trend/kecenderungan yang sama juga terjadi pada dua ukuran pemusatan lain yakni median dan modus. Terlihat bahwa nilai median, beranjak dari angka 60 (*pre test*) menjadi angka 80

(post test). Sedang nilai modus pada hasil *pre test* berada pada angka 60 lalu melonjak ke angka 80 (hasil *post test*). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan dari para peserta PkM dalam menjawab beragam pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian.

3. Penurunan angka standar deviasi antara hasil *pre test* bila dibandingkan dengan hasil *post test*, dari 16,026 menjadi 15,761, memberikan gambaran bahwa data hasil *post test* cenderung lebih homogen (variabilitas lebih rendah) bila dibandingkan dengan data *pre test*. Hal ini mempertegas bahwa kegiatan PkM ini telah mampu memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para peserta yang terlibat dalam pengabdian ini.

PENUTUP

Pengembangan BUMDes di Pekon Sukabanjar dapat dilakukan dengan memvariasikan jenis usaha mengacu pada hasil pemetaan prukades pada pekan tersebut. Dua produk unggulan desa di Pekon Sukabanjar yang dapat dijadikan pertimbangan perluasan variasi jenis usaha diantaranya hasil pertanian dan potensi wisata. Mengacu hasil pembahasan di atas, luaran rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yakni pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat dan juga pengelola BUMDes agar mereka mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan manajerial BUMDes. Lebih dari itu, dengan pendampingan yang interns tersebut diharapkan akan muncul partisipasi masyarakat dalam implementasi program kerja BUMDes di Pekon Sukabanjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Datin Kemendesa, (2019). *Daftar badan usaha milik desa (BUMDES) di Provinsi Lampung*. Retrieved from http://datin.kemendesa.go.id/simpورا/rep_bumdessmry.php
- Kemendesa PDTT, (2016). *Daftar Daerah Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun*. Retrieved from http://datin.kemendesa.go.id/simpورا/report_tertinggal_ipdsmry.php

Kemendesa, (2020). *Sistem informasi pembangunan desa*. Retrieved from: <https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id/>

Maps Google, (2019). Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat. Retrieved from <https://maps.google.com>

Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. (2016). Optimalisasi dana desa dengan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) menuju desa mandiri. *Journal of Accounting and Business*, 16 (1), 37-45.

Novianti, K., & Hakam, S., (2014). *Pengembangan produk unggulan melalui program inkubasi dalam pembangunan pedesaan di Propinsi Riau: kerangka konsep dan rekomendasi*. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Prasetya, D.B. and Ansar, Z., (2017). *Pengembangan desa wisata berbasis community based tourism pada kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat. Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6 (1), pp.60-72.

Sumino, S., Mude, H., Alam, S.S. and Dini, D., (2017). *Protected, prohibited, and invasive fish diversity and distribution in Ranau Lake of West Lampung District. Aquasains*, 6 (1), 573-578.